

MENGELOLA PRASANGKA SOSIAL DAN STEREOTIPE ETNIK- KEAGAMAAN MELALUI *PSYCHOLOGICAL AND GLOBAL EDUCATION*

Oleh : Fathur Rahman

K. S. Sandhu, *Director Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)* Singapura, ketika memberikan kata pengantar dalam buku “*Islam and Society in Southeast Asia*”, mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir variabel-variabel etnis dan agama telah menciptakan kebingungan yang sedemikian besarnya di kalangan pengamat sosial. Sebagian besar di antaranya banyak yang berharap secara liberal modernisasi dapat mengaburkan perbedaan etnis. Variabel lainnya berupa pendidikan dan komunikasi global akan membuat masyarakat menjadi semakin homogen ternyata tidak kunjung menjadi kenyataan. Demikian pula halnya dengan harapan radikal yang menginginkan perbedaan agama, bahasa, dan kebudayaan akan lenyap seiring dengan munculnya kesadaran kelas ternyata juga tinggal harapan.

Ternyata, kenyataan yang terjadi berlawanan dengan apa yang diidam-idamkan oleh sebagian analis sosial tersebut. Gagasan yang menyatakan bahwa kesamaan suku, agama, dan golongan sebenarnya dapat meredam timbulnya konflik hanyalah tinggal fantasi intelektualitas semata. Namun, dalam realitas tidaklah demikian. Krisis dan konflik kebudayaan yang disebabkan oleh interaksi budaya yang tidak harmonis, atau fenomena pemaksaan antara kebudayaan yang satu terhadap lainnya telah mengancam tujuan ideal kebudayaan, yaitu kerukunan dan perdamaian. Ramalan atau lebih tepatnya tesis, yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington tentang terjadinya sebuah benturan peradaban (*clash of civilization*) yang *notabene* sarat dengan dimensi etnik dan agama, walaupun mendapatkan kritik tajam dari berbagai kalangan, nyatanya wacana itu telah menjadi bahan diskusi hangat hampir di seluruh kalangan hingga kini. Apalagi ketika ternyata di berbagai kawasan terus berlangsung kerusuhan-kerusuhan yang bersifat kekerasan antar-etnis. Dalam uraiannya lebih lanjut, Huntington menambahkan sebuah catatan menarik bahwa selama perang dingin saja terdapat 32 konflik etnis berskala massif dan 57

ethnopolitics conflicts. Ia juga mengutip berita dari *New York Times* yang mengidentifikasi 48 konflik dari 59 konflik pada tahun 1993 yang merupakan konflik etnis atau berkaitan dengan etnis.

Serangkaian kerusuhan sosial yang terjadi di Indonesia seperti kerusuhan Sambas dan Sanggau Ledo (Kalimantan Barat), Ambon (Maluku), Poso (Sulawesi Tengah), Sampit (Kalimantan Tengah) tidak terlepas dari dimensi etnis dan agama, walaupun terdapat faktor-faktor seperti kesenjangan struktural dan ketidakadilan sistem. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh “Ahmed Team” (<http://www.ahmedteam.com>) mengungkapkan fakta penting berupa munculnya tarik ulur persepsi pihak Kristen dan Muslim tentang apakah sebenarnya yang melatarbelakangi konflik Maluku. 29 persen responden menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh konflik campuran, dan 17.8 persen dari kalangan muslim berpendapat bahwa faktor paling dominan adalah sensitivitas keagamaan. Realitas faktual ini kiranya dapat memunculkan latensi konflik, artinya bahaya laten dari faktor-faktor tersebut dapat berubah menjadi sikap sensitif. Lalu, sering dikatakan keadaan masyarakat bagaikan “bersumbu pendek”.

Realitas banyaknya konflik antaretnik ini setidaknya-tidaknnya membenarkan asumsi teoritis yang menyatakan bahwa pluralisme etnik merupakan salah satu potensi terjadinya konflik yang bersifat horisontal. Fakta juga menunjukkan bahwa potensi pluralisme etnik terhadap terjadinya konflik-konflik horizontal memang sangat tinggi. Selain itu, ketidakpuasan atau ketidakadilan di bidang sosial, politik, ekonomi, dan hukum dapat menjadi variabel penyumbang. Atau, beberapa analisis sosial berasumsi bahwa potensi konflik menjadi bersifat laten karena sistem pendidikan yang tidak mampu menyentuh aspek-aspek psikologis dan manajemen mental individu dalam berinteraksi dengan komunitas serta lingkungan sosialnya.

PRASANGKA SOSIAL DAN STEREOTIPE ETNIK DALAM INTERAKSI MULTIKULTURAL

Memahami kebudayaan multikultural dan potensi konflik yang dimunculkannya bukanlah sesuatu yang gampang. Salah satu variabel penting yang perlu dieksplorasi lebih

jauh adalah aspek-aspek psikologis atau tipologi kepribadian psikososial yang membentuk kognisi, sikap, dan perilaku sosial atau kelompok serta kaitannya dengan interaksi multikultural. Di Indonesia sendiri, referensi-referensi dan publikasi riset tentang aspek-aspek psikologis suatu komunitas dan interaksinya dengan komunitas lain masih sangat jarang dan amat terbatas. Padahal, kajian-kajian psikologi sosial dapat memberikan kontribusi yang besar dalam menjelaskan fenomena konflik sosial yang muncul dan model terapi komunitas seperti apa yang dapat diberlakukan untuk meredam latensi konflik tersebut. Beberapa aspek kajian yang akan dikemukakan di sini, yaitu prasangka sosial dan stereotipe etnik.

Prasangka sosial (Manstead dan Hewstone, 1996) didefinisikan sebagai suatu keadaan yang berkaitan dengan sikap-sikap dan keyakinan-keyakinan. Yaitu, ekspresi perasaan negatif, penunjukkan sikap bermusuhan atau perilaku diskriminatif terhadap anggota kelompok lain. Beberapa kasus tertentu yang berhubungan dengan tindakan seksisme dan rasisme juga dianggap sebagai prasangka. Prasangka sosial yang pada mulanya hanya merupakan sikap-sikap perasaan negatif itu, lambat-laun menyatakan dirinya dalam tindakan-tindakan yang diskriminatif terhadap orang-orang yang termasuk golongan yang diprasangkai itu, tanpa terdapat alasan-alasan yang objektif pada pribadi orang yang dikenakan tindakan-tindakan diskriminatif. Prasangka ini dapat bersumber dari dorongan sosiopsikologis, proses-proses kognitif, dan pengaruh keadaan sosiokultural terhadap individu dan kelompoknya (Manstead dan Hewstone, 1996).

Prasangka sosial ini bergandengan pula dengan stereotipe. Istilah ini mengacu pada suatu gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat-sifat dan watak pribadi orang golongan lain yang bercorak negatif. *Dalam The Blackweel Encyclopedia of Social Psychology* (Manstead dan Hewstone, 1996) stereotipe didefinisikan sebagai keyakinan-keyakinan tentang karakteristik seseorang (ciri kepribadian, perilaku, nilai pribadi) yang diterima sebagai suatu kebenaran kelompok sosial. Sebagai contoh, orang Italia itu romantis, wanita kurang bisa mengendarai mobil, seorang homoseks memiliki pandangan politik yang liberal, dan lain-lain. Stereotipe etnik itu sendiri merupakan keyakinan-keyakinan yang dilekatkan pada komunitas etnik lain yang dianggap sebagai kebenaran

turun-temurun dan selalu terdapat dalam diri komunitas tersebut. Misalnya, sifat dan watak semua orang Negro adalah bodoh, kurang ajar, dan tidak berperadaban. Atau, banyak orang yang menganggap bahwa orang Madura memiliki temperamen keras dan kasar dalam berinteraksi secara sosial dengan orang lain, cenderung tidak peduli dengan orang lain, dan sebagainya.

Pengalaman kebudayaan Amerika, yang dianggap sebagai kampiun demokrasi, juga tidak terlepas dari prasangka dan stereotipe sosial. Publikasi penelitian yang diterbitkan oleh *American Psychological Association* (Dovidio et. al, 2002) menjelaskan bahwa di abad global-modern ini saja masih terdapat bias persepsi pada diri orang kulit putih dalam perilaku verbal terhadap orang Negro. Orang-orang kulit putih ternyata lebih ramah dan bersahabat terhadap kalangan mereka sendiri. Hochschild (Dovidio et. al, 2002) menjelaskan bahwa perilaku orang-orang kulit putih yang kadang-kadang berbeda dan kontradiktoris terhadap orang kulit hitam dalam interaksi antar-ras dapat memberikan kontribusi iklim yang miskomunikatif, mispersepsi, dan ketidakpercayaan di Amerika Serikat. Bahkan menurut Anderson (Dovidio et al, 2002) mayoritas orang kulit hitam di Amerika dewasa ini memiliki ketidakpercayaan yang sangat besar terhadap polisi dan sistem hukum, terutama ketidakpercayaan terhadap orang-orang kulit putih.

Riset tentang stereotipe etnik yang dilakukan oleh tim dari Universitas British Columbia (Schaller et. al, 2002) memperoleh temuan penting tentang tipisnya jarak antara stereotipe pada level pribadi dan level budaya. Menurut tim peneliti ini, selama ini stereotipe hanya dibatasi pada keyakinan-keyakinan yang bersifat personal-individual terhadap suatu kelompok tertentu. Namun, stereotipe juga harus dilihat pada level budaya, yakni seperangkat keyakinan yang terbentuk dalam komunitas-komunitas tertentu sebagai akibat dari proses kebudayaan. Walaupun demikian, definisi stereotipe pada level budaya ini merupakan suatu hal yang sensitif, karena pada dasarnya seperangkat keyakinan stereotipe itu sendiri umumnya bersumber dari interaksi individu-individu dalam suatu populasi tertentu (Katz dan Braly; dalam Schaller et. al, 2002).

Maka, tidaklah mengherankan apabila stereotipe pada level budaya ini dapat memicu pembentukan kognisi dan sikap sosial yang apologetik dan klaim-klaim

kebenaran (*truth claim*). Sebagai contoh; anggapan yang lekat dalam diri kebanyakan muslim akan sangat berbeda dengan pandangan orang Katolik-Kristen tentang kepemimpinan Abbasiyah di Spanyol. Orang Islam akan mengklaim bahwa kehadiran Islam di Spanyol adalah berkah bagi Eropa, karena peradaban cemerlang Spanyol zaman pertengahan turut mengantarkan umat manusia pada zaman *Renaissance*. Akan tetapi, bagi orang Katolik-Kristen kekuasaan Islam atas Spanyol dan banyak wilayah pendudukan lainnya semakin membuktikan bahwa Islam itu disebarluaskan melalui pedang dan perang (Kuntowijoyo, 2001).

Dalam kehidupan sehari-hari, embrio sikap apologetik dan *truth claim* ini tanpa disadari telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam diri bangsa Indonesia. Seringkali dengan mudahnya kita sering berkomentar sekenanya atas keberadaan agama dan umat lain. Atau, misalnya, kebanyakan orang Islam masih ada yang beranggapan bahwa musuh utama umat Islam adalah Kristenisasi. Pada akhirnya, kerangka pikir yang mengendap dalam kesadaran akal kita membentuk pola relasi sosial “kita vs mereka”. Yakni, suatu pola yang menganggap umat beragama atau etnis lain sebagai musuh bersama (*common enemy*) yang harus dibenci, diremehkan, disepelkan, dan bahkan diperangi. Ironisnya lagi, paradigma berpikir, pola sikap, dan bentuk tindakan yang inheren dalam kepribadian kita telah ditularkan secara genealogis kepada generasi-generasi yang lahir kemudian.

PENDIDIKAN GLOBAL DAN PENDIDIKAN PSIKOLOGIS

Pada pertengahan tahun 1990-an, ada sebuah forum yang bernama “*Schule fuer Eine Welt*” (Sekolah demi Dunia yang Satu) dari Swiss. Dalam metode pendidikan yang dikembangkannya muncul empat ide arahan, yaitu perluasan wawasan kependidikan, refleksi identitas, perubahan pola hidup, dan hubungan antara lokal dan global. Wolfgang Klafki (Ivan A. Hadar, 2000), misalnya, menuntut bahwa dalam jangka menengah, peserta didik seluruh dunia harus diperkenalkan kepada permasalahan kunci dunia modern, yaitu perang dan damai, arti dan masalah prinsip-prinsip nasionalisme dihubungkan dengan pertanyaan tentang keunikan budaya dan hubungan antar budaya, permasalahan lingkungan terutama yang berkaitan dengan perubahan kesadaran dan pola hidup,

peningkatan tajam penduduk bumi, kesenjangan sosial, dan bahaya serta kemanjuran teknologi.

Adapun perangkat-perangkat filosofis yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut (Ivan A. Hadar, 2000):

1. Gambaran manusia ideal (*menschenbild*) adalah ia yang otonom dan bertanggung jawab memperoleh pengakuan dan mampu menilai dengan jernih dan etis, berdaya dan terbuka bagi perubahan serta belajar sepanjang hidup.
2. Prinsip-prinsip pendidikan global yang diajukan adalah cara berpikir terkait, holistik, refleksi diri berorientasi pengalaman atau sejarah, orientasi aksi, harmoni sosial, serta aktif dan dinamis tanpa kekerasan (*active non-violence*)
3. Terdapat keterpaduan berbagai institusi dan perencanaan kependidikan, tempat dan suasana belajar, struktur waktu, dan metode ajar-mengajar.
4. Harapan terciptanya kompetensi dasar manusia yang memiliki sensitivitas pengamatan, empati, perubahan perspektif, bertanggung jawab, refleksi diri, kooperatif, kemampuan mengatasi konflik dan berpikir sistematis.

Perangkat-perangkat filosofis di atas mengarah pada sebuah paradigma “*satu dunia untuk semua*”. Faktor-faktor sosial yang menunjangnya adalah kesadaran tentang adanya ketergantungan global, perlunya *information society*, pengakuan eksistensi sub-kultur, kemitraan gender, orientasi masa depan, pembangunan berkelanjutan, dan masyarakat yang berkeadilan. Inilah kualifikasi yang seyogyanya harus dipenuhi dan diakses oleh peserta didik terutama yang berada di tingkat awal pendidikan tinggi. Ketidamengertian dan kebutaan tentang “dunia yang satu” ini hanya akan melahirkan entitas-entitas individu yang merasa hidup sendiri bahkan bisa jadi tak memiliki *sense of humanity* sama sekali. Pendek kata, pendidikan global ini akan menjadi jembatan antara nilai-nilai kapitalistik-globalitas menuju internalisasi nilai-nilai demokratis dan kebersamaan kemanusiaan yang hakiki. Harapannya adalah demi perdamaian tanpa penindasan !

Di samping itu, perangkat-perangkat filosofis seperti itu perlu diperkaya dengan perangkat-perangkat metodik seperti metode *knowledge society* atau menurut Peter Drucker (Jalauddin Rahmat, 1998) adalah *universal literacy*. Metode-metode di atas dikembangkan dalam rangka memberikan pemahaman kepada anak agar ia menjadi partisipan yang positif dalam arena internasional yang paham betul akan arti dan aksi sikap empati, kepercayaan, kerjasama, dan memahami kualitas kehidupannya sejak awal serta memahami nilai-nilai bersama sebagai nilai-nilai universal (*we are living together*)

Bercermin dari berbagai krisis dan bencana sosial yang melanda berbagai masyarakat di berbagai daerah dan eskalasi problematika psikis remaja peserta didik serta pentingnya pemahaman global tentang pendidikan, tampaknya kita membutuhkan apa yang disebut sebagai revolusi dan transformasi bidang kesehatan mental (Leonard, 1973; dalam Brammer, 1979). Revolusi dan transformasi kesehatan mental yang dimaksud adalah upaya preventif dan ekstensif menolong warga masyarakat termasuk warga belajar meningkatkan kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas kehidupan pada tingkatan yang semakin tinggi, khususnya lewat penguasaan berbagai keterampilan hidup (*life skills*) bersama, komunikasi antar pribadi, dan pertumbuhan pribadi. Konsep ini belakangan dikenal secara luas sebagai pendidikan psikologis (*psychological education*), bukan pendidikan psikologi (Brammer, 1979). Tujuan pendidikan ini adalah menolong individu menguasai berbagai keterampilan hidup (*life skills*) penting lewat program-program terstruktur yang diselenggarakan dalam kelompok-kelompok. Kata kuncinya adalah *life skills*, yaitu mendengarkan dan memahami secara empatik (*emphatic understanding*), menyampaikan pesan; mengungkapkan pikiran dan perasaan (*self disclosure*), resolusi konflik, membuat perencanaan (*strategic planning*), dan *problem solving*, mengambil keputusan (*decision making*), *coping* terhadap aneka *stressor*, menjalani berbagai transisi hidup dan perkembangan secara berhasil, dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di sekolah dan perguruan tinggi (Nelson-Johns, 1982).

Dalam rangka itu semua, pada level sekolah, peran dan fungsi pembimbing dan konselor sebaiknya diperluas, bukan hanya sebagai *support personal* atau *counselor aides* dengan tanggung jawab yang cenderung administratif melainkan disiapkan untuk menjadi

konselor dan *trainers* dengan pendekatan individual dan kelompok di bidang *life skills*. Pada kelompok-kelompok sasaran yang mereka layani, para pembimbing dan konselor sekolah juga perlu mempersiapkan *indigenous trainers* dari kalangan siswa (pendekatan konseling sebaya), sehingga kehadiran pembimbing-konselor sekolah yang *well-educated* dapat memiliki *multiplier effect* menuju terbentuknya pribadi dan masyarakat sekolah yang makin sehat, efektif, dan sejahtera. Dengan cara ini, kita berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya mengentaskan, atau paling tidak mereduksi masyarakat kita dan masyarakat sekolah pada khususnya dari krisis menuju kehidupan baru yang lebih baik.

PENUTUP

Dalam konteks dan perspektif gagasan yang singkat dan terasa kurang ini, kajian tentang pendidikan psikologis bagi upaya mengurangi eskalasi potensi konflik dan pengelolaan aspek-aspek psikososial individu dan kelompok hanyalah satu dari sekian banyak model intervensi lainnya. Sentuhan pada aspek-aspek psikologis dan kepribadian sosial ini sejalan dengan tujuan pendidikan umum yang memandang bahwa pembentukan watak pribadi mencakup dua dimensi, yaitu dimensi intelektualistik dan holistik. Dimensi pertama bertujuan mendampingi peserta didik dan warga belajar untuk mencapai perkembangan intelektual secara optimal melalui kegiatan akademik-kurikuler. Dimensi kedua bertujuan mendampingi warga belajar, generasi muda untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan pribadi secara utuh, meliputi segi personal, sosial dan intelektual.

Yogyakarta, 8 November 2002

Penulis adalah Staf Peneliti LP3
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta/
Mahasiswa Prapascasarjana Psikologi UGM

REFERENSI

- Brammer, L. M. (1979). *The Helping Relationships. Process and Skills*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
- Dovidio, J. F., Kawakami, Kerry, & Gaertner, S. L. (2002). *Implicit and Explicit Prejudice and Interracial Interaction. Journal of Personality and Social Psychology*, 82, 1, 62 – 68.
- Ivan A. Hadar, Pendidikan Global dalam Kompas, 11 April 2000
- Kuntowijoyo. (2001). *Muslim Tanpa Masjid; Esai-esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*, Bandung: Penerbit Mizan
- Manstead, Anthony S. R., & Hewstone, Miles. (1996). *The Blackwell Encyclopedia of Social Psychology*. Oxford, UK: Blackwell Publishers.
- Nelson-Jones, R. (1982). *The Theory and Practice of Counseling Psychology*. London: Holt, Rinehart & Winston.
- Rakhmat, Jalaluddin, Ph. D.,. (1998). *Catatan Kang Jalal, Visi Media, Politik, dan Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya
- Schaller, Mark, Conway, L. G., & Tanchuk, T. L. (2002). *Selective Pressures on the Once and Futurer Contents of Ethnic Stereotypes: Effects of the Communicability Traits. Journal of Personality and Social Psychology*, 82, 6, 861 – 877.